



# Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

Ir. Siti Fathonah, MPH  
Kepala Biro Perencanaan BKKBN

Jakarta, 4 November 2021

Disampaikan Pada Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Analisa Situasi dan Pemetaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Penurunan *Stunting*, Kerjasama Setwapres dengan Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri



# OUTLINE:



01

Mandat Perpres No. 72/2021

02

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Pendekatan Keluarga

03

Kelembagaan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

04

Mekanisme Pendampingan Keluarga

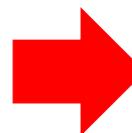
05

Mempersiapkan Tim Pendamping Keluarga

01

# MANDAT PERATURAN PRESIDEN NO. 72/2021

**STRANAS:**  
Acuan Dalam Rangka Menyelenggarakan  
Percepatan Penurunan *Stunting*



# 14%

Utk pelaks STRANAS  
disusun RAN -> Ps 8 (1)



**RENCANA AKSI NASIONAL**  
Meliputi paling sedikit  
5 hal -> Ps 8 (3)

1. Penyediaan **data keluarga berisiko stunting**
2. Pendampingan **keluarga berisiko stunting**
3. Pendampingan semua calon **pengantin/calon PUS**;
4. **Surveilans** keluarga berisiko *stunting*
5. **Audit** kasus *stunting*



Ditetapkan oleh Kepala Badan  
-> Ps 8 (2)

## TUJUAN

1. Menurunkan prevalensi stunting
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

## PILAR STRANAS

1. Peningkatan **komitmen dan visi kepemimpinan** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan **komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat**;
3. Peningkatan **konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan **ketahanan pangan dan gizi** pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan **sistem, data, informasi, riset, dan inovasi**

# BKKBN

Sebagai

**KETUA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
siap melaksanakan arahan presiden pada rapat terbatas (ratas) percepatan  
penurunan stunting tanggal **28 Januari 2021**

menjadi **14%** melalui pendekatan keluarga



Rencana Aksi Nasional 

Mekanisme Dan Tata Kerja 

Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan 

**PERATURAN PRESIDEN Nomor 72 tahun 2021**  
tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

**Terdapat 4 (empat) peraturan pelaksanaan**  
**sebagai turunan Perpes 3 diantaranya di bawah**  
**koordinasi BKKBN**

Dalam Satu  
PERBAN  
RAN PASTI

## Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia

**RAN PASTI**

“



“

→ Ps 8 (4):

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh K/L, Pemerintah Daerah Prov, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*

“

“

# LAMPIRAN A PERPRES 72/2021



## Target Antara Percepatan Penurunan Stunting



### Layanan Intervensi Spesifik → 9 Indikator



(%) ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.



(%) ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) min. 90 tablet selama masa kehamilan.



(%) remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).



(%) bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.



(%) anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.



(%) anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.



(%) balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap



### Layanan Intervensi Sensitif → 11 Indikator



(%) pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.



(%) kehamilan yang tidak diinginkan



Cakupan PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.



(%) rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kab/kota lokasi prioritas.



(%) rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di kab/kota lokasi prioritas.



Cakupan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.



Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan



Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.



(%) target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang Stunting di lokasi prioritas



Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.

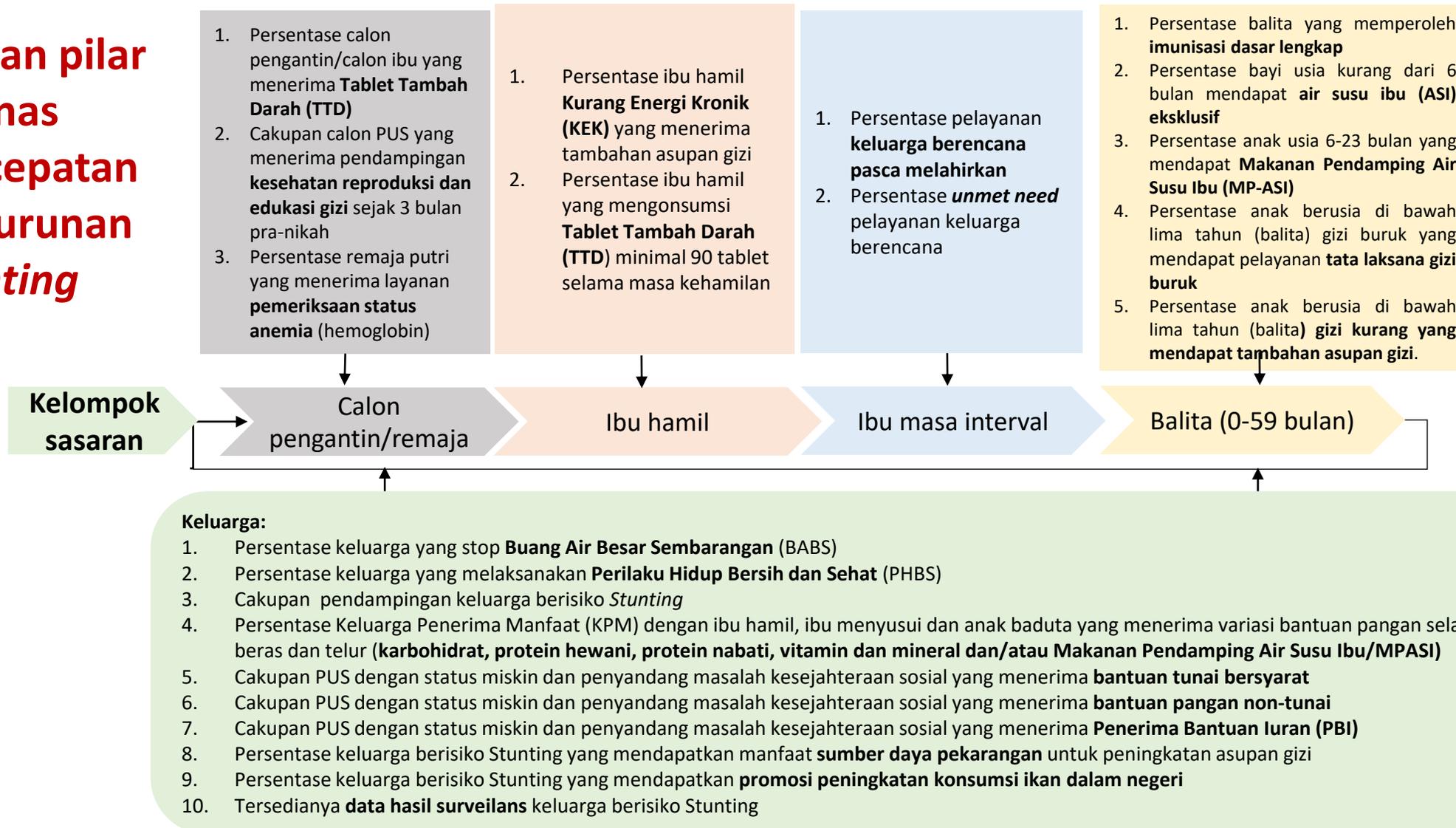


(%) desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free*

# LAMPIRAN B PERPRES 72/2021



## Uraian pilar stranas percepatan penurunan stunting



Terdapat **21 indikator** dengan PJ-nya adalah Pemerintah Daerah kab/kota dengan unit intervensi **remaja, ibu hamil, ibu masa interval, balita dan keluarga** (sumber: Perpres 72/2021)

# Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI)



## Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan
- Dasar Hukum

## Bab II. Rencana Aksi Nasional

- Target Antara dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
- Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI)
- Kerangka Pelaksanaan RAN PASTI

## Bab III. Kelembagaan dan Mekanisme Tata Kerja

- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan
- Tim Pendamping Keluarga

## Bab IV. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

## Bab V. Kerangka Regulasi dan Pendanaan

## Bab VI. Penutup

## Lampiran: Indikator RAN PASTI

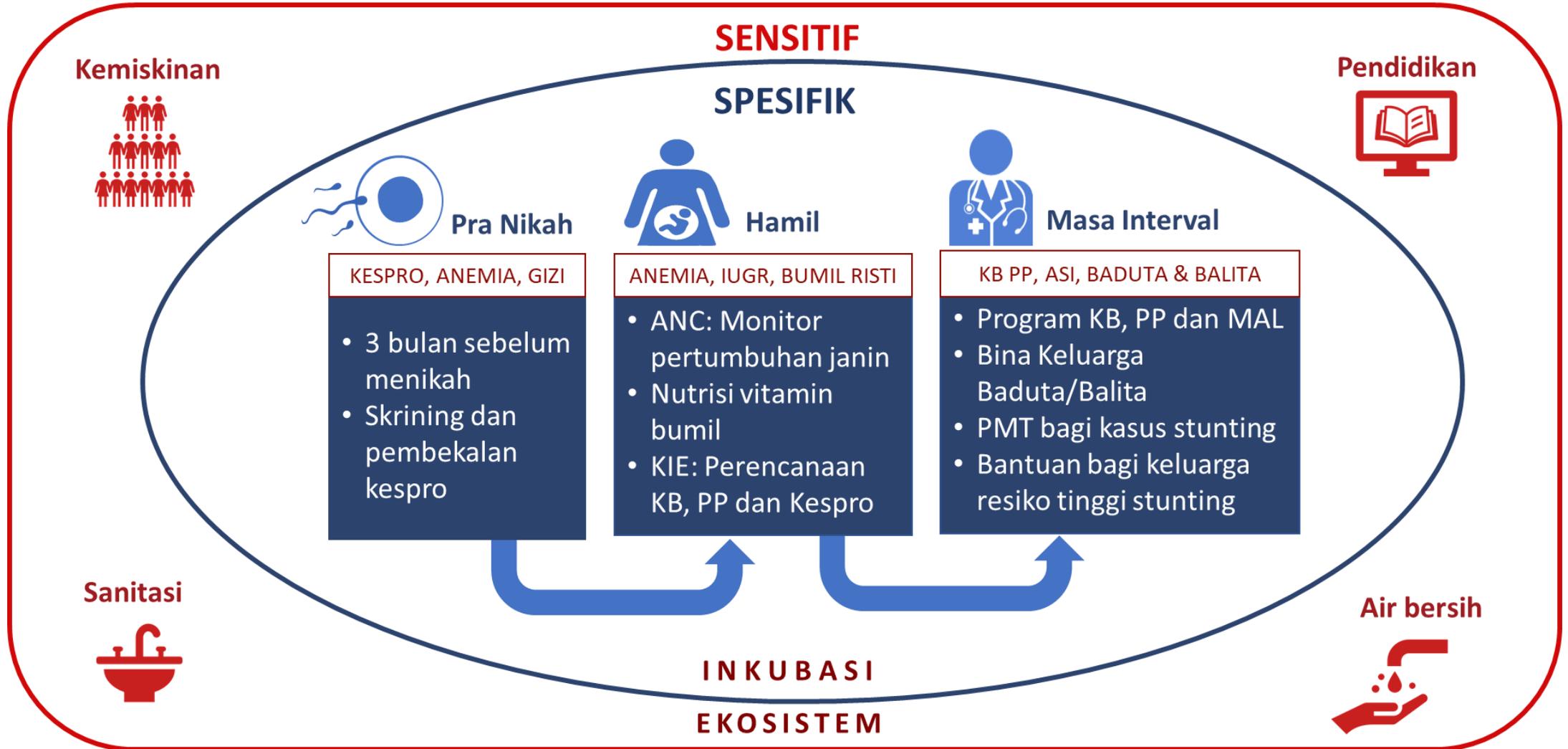
→ **Ps 8 (2): Ditetapkan  
oleh Kepala Badan**

Ps8 (4):

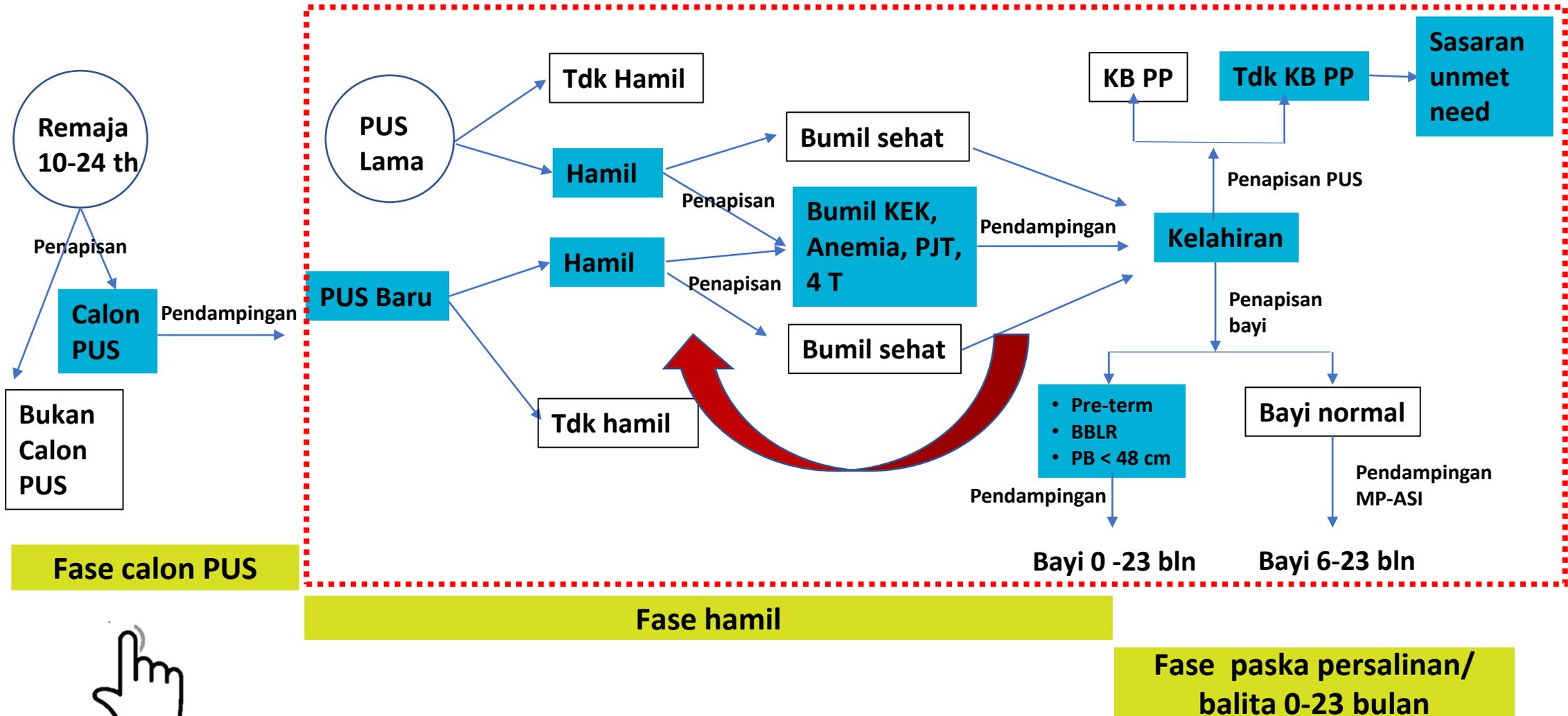
Rencana aksi nasional  
**dilaksanakan oleh K/L,  
Pemerintah Daerah Kab/Kota,  
Pemerintah Desa, dan  
pemangku Kepentingan** dalam  
pelaksanaan Percepatan  
Penurunan *Stunting*

02

# STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI PENDEKATAN KELUARGA



# SKRINING DAN PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



# SIAPA KELUARGA BERISIKO TINGGI *STUNTING* ?



## Pengertian :

Kondisi Pasangan suami istri usia subur (PUS) yang berpotensi melahirkan anak *stunting*

**01**

**Miskin**

**02**

**Anak > 2 , tidak Berkontrasepsi**

**03**

**Anak usia < 2 th tidak berkontrasepsi**

**04**

**Riwayat punya anak stunting**

**05**

**Istri punya penyakit tertentu yang mempengaruhi kualitas kehamilan (jantung, diabetes, hipertyroid)**

**06**

**Istri usia < 20 tahun atau > 35 th**

**07**

**Anak baduta dengan penyakit tertentu**

**08**

**Lingkungan kumuh**

**09**

**Menghuni RTLH /tidak ada jamban sehat**

**10**

**Tidak ada akses air bersih**

03

# KELEMBAGAAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

# KELEMBAGAAAN DI SEMUA TINGKATAN

## → Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*



### Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS)

1.

#### Tingkat Pusat

Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana

2.

#### Tingkat Provinsi

**Ditetapkan oleh Gubernur**

Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

3.

#### Tingkat kabupaten/kota

**Ditetapkan oleh bupati/wali kota**

Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

4.

#### Tingkat kecamatan

Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota

5.

#### Tingkat Desa/Kelurahan

**Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah**

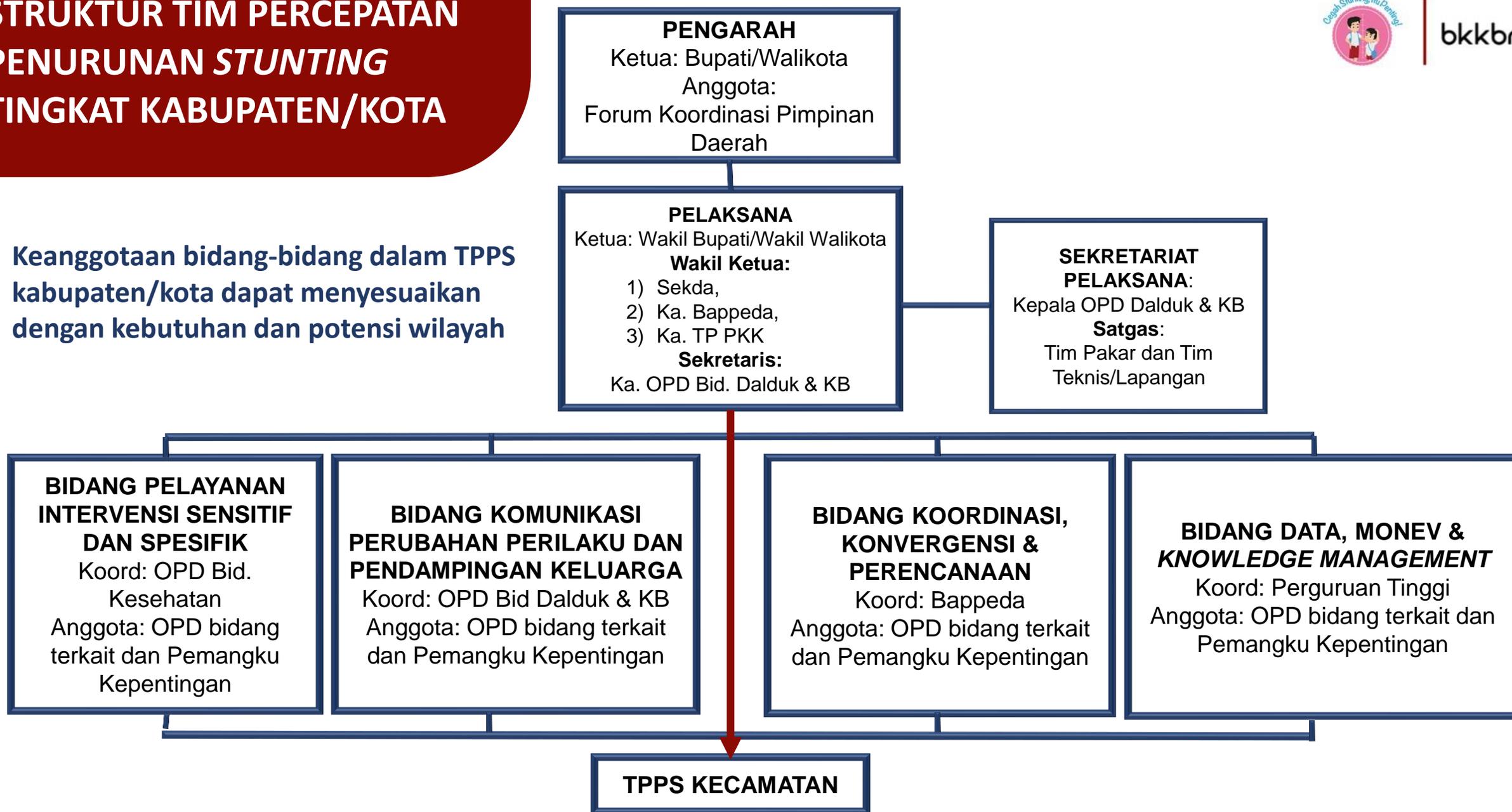
Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy. lain

**Tugas Tim:** mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya.

# STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN/KOTA



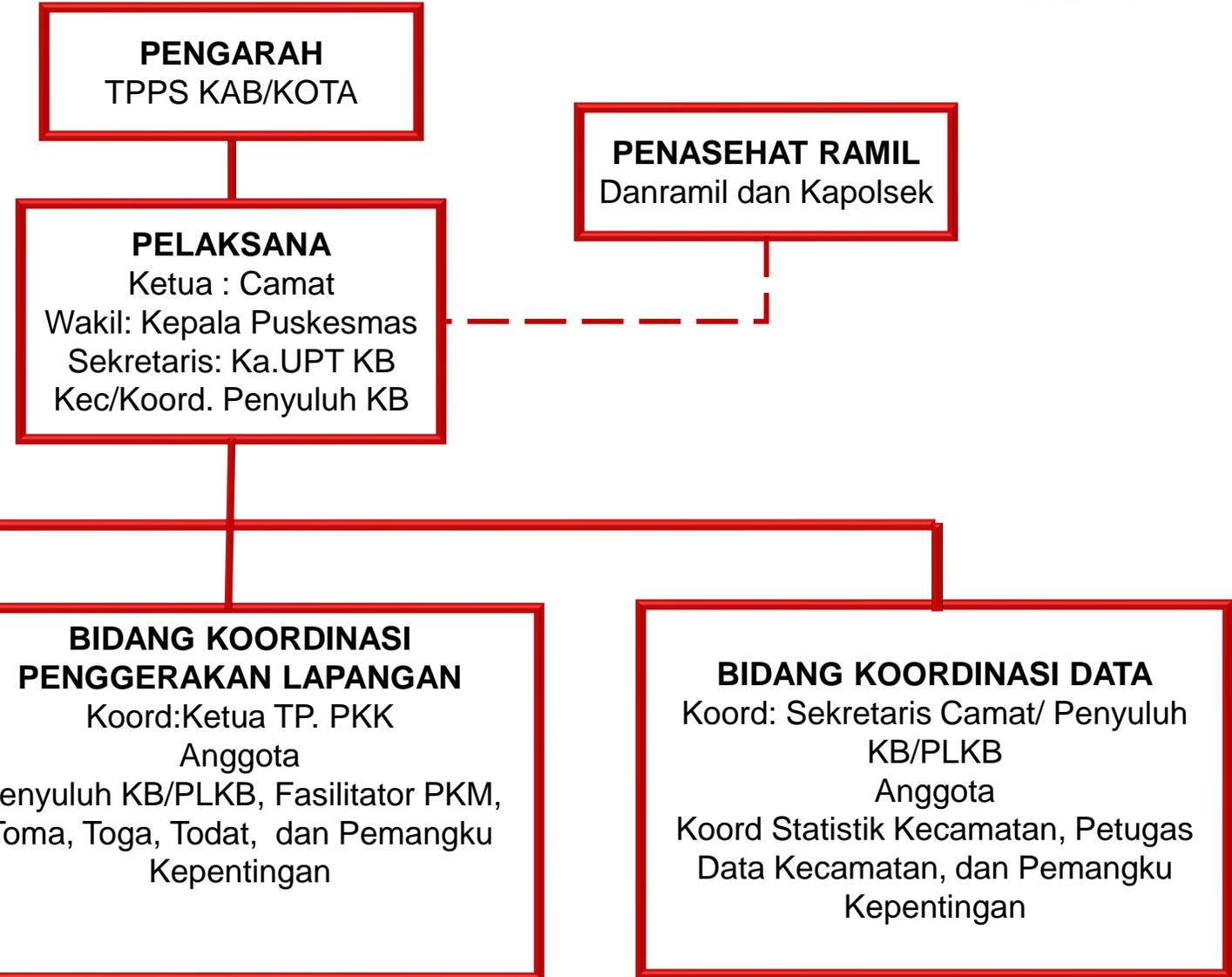
Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten/kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah





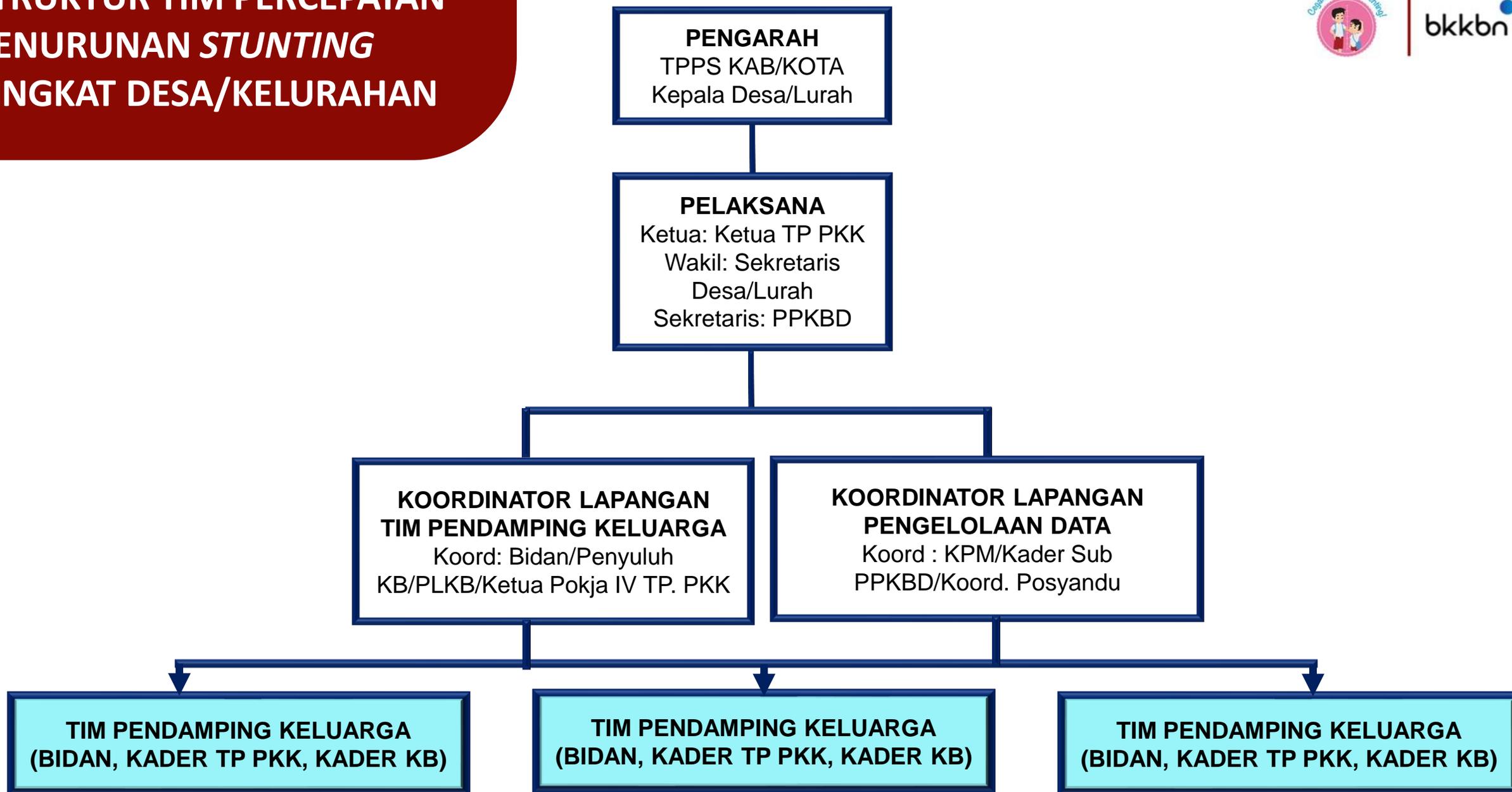
# STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

Keanggotaan bidang-bidang dalam  
TPPS Kecamatan dapat  
menyesuaikan dengan kebutuhan  
dan potensi wilayah



Sumber: RAN PASTI

# STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA/KELURAHAN



04

# MEKANISME PENDAMPINGAN KELUARGA

# SUMBER DATA KELUARGA BERISIKO *STUNTING*

**Pendataan Keluarga 2021 (PK21)**



**4 Nov 2021:  
Launching Hasil PK21  
Oleh Bapak Menko PMK**



**Keluarga Berisiko Stunting  
(akan dikeluarkan datanya per RT)**



**Menjadi data dasar/pegangan  
bagi Tim Pendamping Keluarga**

# TIM PENDAMPING KELUARGA



Bekerja sebagai *Team work* yang solid, yang dikoordinir oleh bidan atau PKK desa

## TIM PENDAMPING KELUARGA BIDAN, KADER PKK dan KADER KB

### TUGAS

- Mendeteksi dini faktor resiko *stunting* (spesifik & sensitif);
- Pendampingan dan Surveilans pada 3 hal:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayan rujukan; dan
  - c. penerimaan bantuan sosial

### KEGIATAN DAN SASARAN PENDAMPINGAN KELUARGA



Catin



Ibu Hamil

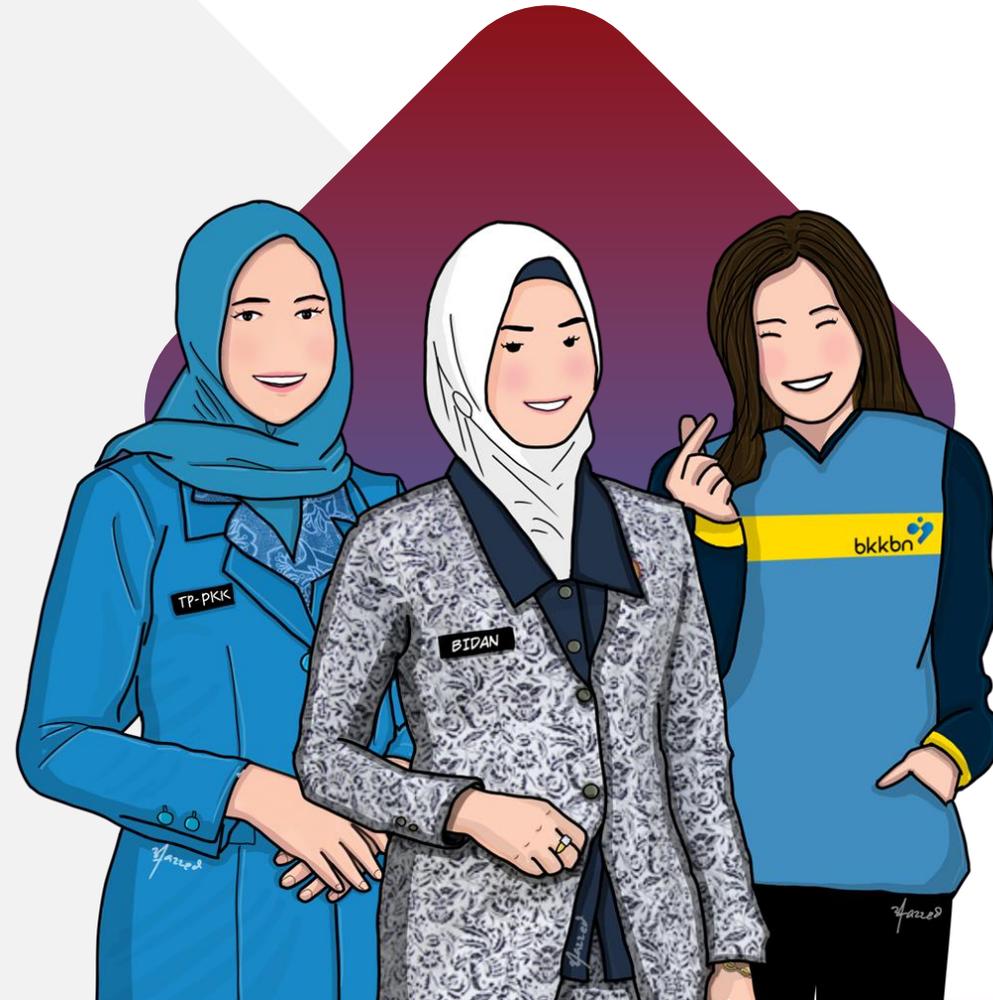


Pasca Persalinan



Anak 0-5 Th  
(Anak 0-2 Th Prioritas)

identifikasi faktor risiko *stunting* dan melakukan pelayanan KIE pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*



# KRITERIA DAN KOMPOSISI TIM PENDAMPING KELUARGA



## KRITERIA :

- Ijazah Pendidikan Bidan
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan gadget

## KOMPOSISI :

- Ideal : Bidan**, jika tidak tersedia bidan maka bisa digantikan dengan Tenaga Kesehatan lain. Minimal 1 Tim di Desa terdapat Bidan



## KRITERIA :

- Pengurus/Anggota TP PKK (SK)
- Berdomisili di Desa/Kelurahan
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan gadget

## KOMPOSISI :

- Dapat berasal dari pengurus ataupun anggota dari Pokja I s.d Pokja IV



## KRITERIA :

- Pengurus/Anggota IMP (SK)
- Berdomisili di Desa/Kelurahan
- Kemampuan komunikasi
- Kemampuan gadget

## KOMPOSISI :

- PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Dasawisma, Tenaga Penggerak Program/Desa, Kader Organisasi Agama/Kemasy, TOMA/TOGA

# PEMBAGIAN PERAN DARI MASING-MASING PIHAK TIM PENDAMPING KELUARGA



**KOORDINATOR & PEMBERI  
PELAYANAN MEDIS**



**PENGGERAK & FASILITOR  
(MEDIATOR)**



**PENCATATAN DAN PELAPORAN  
DATA PENDAMPINGAN**

# LANGKAH KERJA TIM PENDAMPING KELUARGA



1. Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan TPPS sekaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
2. Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan Stunting sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kerangka percepatan penurunan Stunting.
3. Tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko Stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan Stunting. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau manual.

# KEWENANGAN BIDAN

## BIDAN MELAKUKAN PELAYANAN:

1. Kesehatan Ibu
2. Kesehatan Anak
3. Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

## KEWENANGAN BIDAN DALAM PROGRAM PEMERINTAH, meliputi:

1. Pemberian pelayanan AKDR dan Bawah Kulit
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
4. Pemberian Imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah
5. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang KIA, anak usia sekolah dan remaja dan penyehatan lingkungan
6. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap IMS termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya

Sumber : Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan



# KEGIATAN BIDAN DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN



CALON PENGANTIN/CALON PUS	IBU HAMIL	IBU BERSALIN & PASCA SALIN	ANAK USIA 0 – 59 BULAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan resume hasil skrining kondisi risiko stunting pada calon Pengantin/calon PUS berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga.</li> <li>2. Menjelaskan treatment (perawatan/penanganan) untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi calon pengantin/calon PUS sesuai output Aplikasi Pendampingan Keluarga.</li> <li>3. Menjelaskan treatment (perawatan/penanganan) pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh calon pengantin/calon PUS sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga.</li> <li>4. Memantau dan memastikan kepatuhan calon pengantin/calon PUS dalam mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A dalam peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi).</li> <li>5. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan berkoordinasi dengan dokter (minimal 6 kali selama kehamilan)</li> <li>3. Melakukan pendampingan Ibu hamil dalam rangka pencegahan faktor risiko stunting melalui surveillance ibu hamil dan janin minimal 5 kali;</li> <li>4. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat.</li> <li>5. Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan tim pelayanan ANC terpadu</li> </ol>	<p><b><u>IBU BERSALIN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan deteksi dini faktor risiko</li> <li>2. Melakukan pertolongan persalinan.</li> <li>3. Melakukan rujukan jika diperlukan dan</li> <li>4. Melakukan pendampingan pada kasus rujukan</li> </ol> <p><b><u>IBU PASCA PERSALINAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kunjungan Nifas dan Kunjungan Neonatal /KF dan KN minimal 3 kali.</li> <li>2. Memastikan ibu pascasalin sudah menggunakan KBPP MKJP.</li> <li>3. Melakukan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi masa nifas.</li> <li>4. Melakukan rujukan jika diperlukan dan pendampingan pada kasus rujukan.</li> <li>5. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir</li> <li>2. Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi.</li> <li>3. Melakukan pendampingan tumbuh kembang bayi pada             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia 0 – 23 bulan</li> <li>• Usia 24 – 59 bulan</li> <li>• Melakukan penyuluhan (KIE, pemantauan, stimulasi), fasilitasi rujukan jika diperlukan dan fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga sasaran bantuan social</li> </ul> </li> </ol>



# KEGIATAN KADER TP PKK DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN



CALON PENGANTIN/ CALON PUS	IBU HAMIL	IBU BERSALIN & PASCA SALIN	ANAK USIA 0 – 59 BULAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit tiga bulan sebelum menikah.</li> <li>Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon PUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga.</li> <li>Menghubungkan calon pengantin/calon PUS kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan treatment (perawatan/penanganan) pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat.</li> <li>Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing.</li> <li>Melakukan KIE kepada PUS baru yang belum layak hamil menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA.</li> <li>Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.</li> <li>Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. d) KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi</li> <li>Membantu ibu hamil risiko menerima penyaluran program bansos stunting.</li> <li>Memasang/Menempel Stiker P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) bahwa dirumah tersebut terdapat ibu hamil.</li> <li>Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan.</li> </ol>	<p><b>IBU BERSALIN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA.</li> <li>Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.</li> <li>Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. d) KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi.</li> <li>Membantu ibu hamil risiko menerima penyaluran program bansos stunting.</li> <li>Memasang/Menempel Stiker P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) bahwa dirumah tersebut terdapat ibu hamil.</li> <li>Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan.</li> </ol> <p><b>IBU PASCA PERSALINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KIE tentang pemberian ASI Eksklusif.</li> <li>KIE tentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).</li> <li>Membantu penyaluran program bansos stunting tepat sasaran. d) KIE tentang KBPP (utamakan MKJP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak.</li> <li>Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan.</li> <li>Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup (gizi seimbang dan bervariasi). d) Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.</li> <li>Membantu penyaluran bansos stunting kepada bayi baru lahir 0-59 bulan.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB (Bina Keluarga Balita)</li> </ol>

# KEGIATAN KADER KB DALAM PENDAMPINGAN KE SASARAN

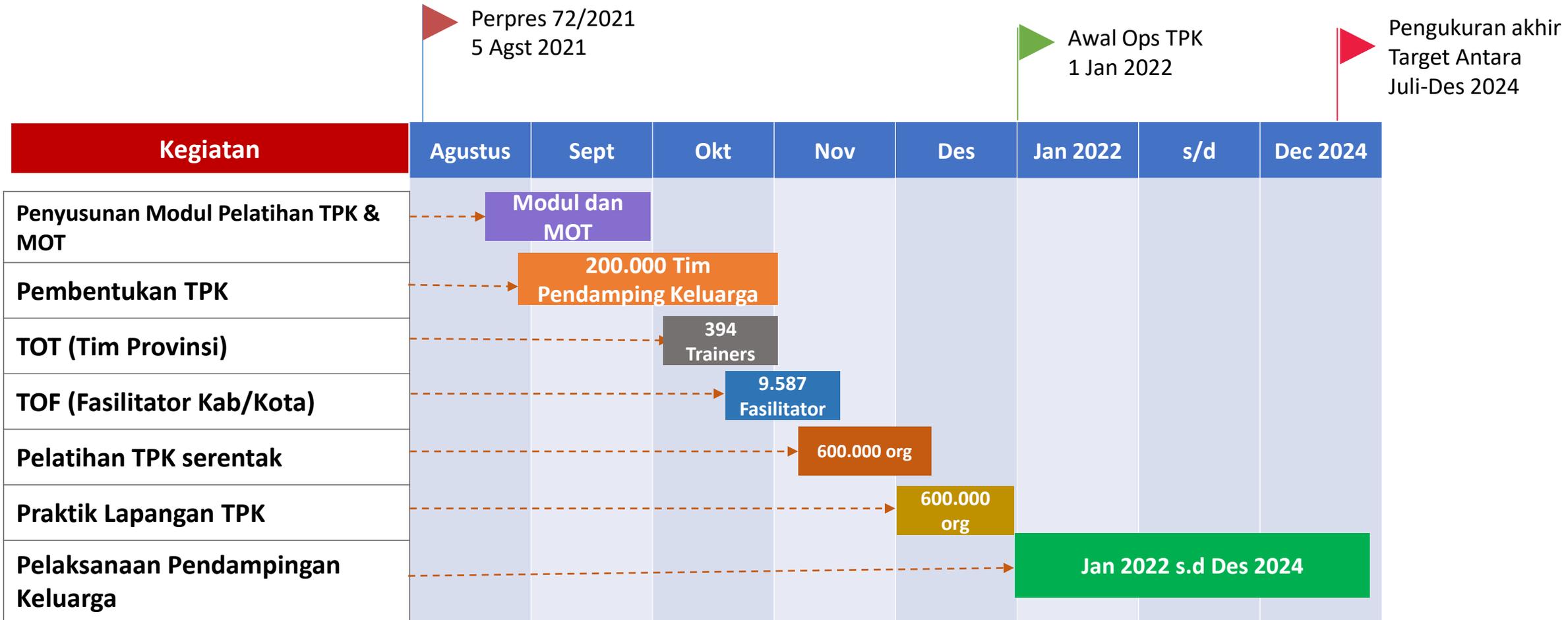
CALON PENGANTIN/CALON PUS	IBU HAMIL	IBU BERSALIN & PASCA SALIN	ANAK USIA 0 – 59 BULAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan KIE dan fasilitas Pelayanan Program Bangga Kencana dan pembinaan keluarga.</li> <li>Melakukan KIE tentang pencegahan stunting pada fase calon pengantin/calon PUS dan memastikan calon pengantin/calon PUS mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh.</li> <li>Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon PUS melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>Memfasilitasi dan memastikan calon pengantin/calon PUS memasukkan/meng-input hasil pemeriksaan kesehatan di Aplikasi Pendamping Keluarga secara benar. e) Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya sesuai dengan resume skrining dari output Aplikasi Pendamping Keluarga.</li> <li>Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendamping Keluarga.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pendampingan catin melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE calon pengantin secara berkala (minimal 2 kali atau lebih sesuai kebutuhan).</li> <li>Melaporkan kondisi keluarga kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan TPPS Desa/Kelurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan dengan skema 2,1,3 dan mendapat pelayanan dokter 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3.</li> <li>Memastikan asupan gizi ibu hamil dan mendapat akses air bersih yang layak.</li> <li>KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi.</li> <li>KIE dan komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).</li> <li>Membantu Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pendampingan ibu hamil melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE ibu hamil secara berkala.</li> </ol>	<p><b><u>IBU BERSALIN</u></b> Memastikan ibu bersalin untuk mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai ketentuan SPM.</p> <p><b><u>IBU PASCA PERSALINAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pelayanan KBPP MKJP</li> <li>KIE tentang 1000 HPK;</li> <li>KIE dan komunikasi antar pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan.</li> <li>Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup (gizi seimbang dan bervariasi).</li> <li>Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.</li> <li>Membantu penyaluran bansos stunting kepada bumil berisiko stunting.</li> <li>Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak.</li> <li>Memastikan anak mendapatkan stimulasi sesuai usia agar tumbuh kembangnya optimal.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB (Bina Keluarga Balita).</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, dan KIE secara berkala.</li> </ol>



05

# MEMPERSIAPKAN TIM PENDAMPING KELUARGA

# Road map Pendampingan Keluarga



# TAHAP PELAKSANAAN PELATIHAN TPK



Penyusunan Modul & Master of Trainers (MOT)  
4-8 Okt 2021

Peserta :  
Pengajar pada TOT

- Deputi Lalitbang
- Ka Pusdiklat
- WI Pusdiklat
- Dittas
- Ditbalnak
- Dithanrem
- Ditlaptik
- Dit KIE
- Dittekda

Training of Trainers (TOT)  
Gel I : 13-19 Okt 2021  
Gel II : 25-29 Okt 2021

- Jumlah Peserta : 394 peserta
- Target Peserta : Perwakilan Mitra Strategis Tk Prov (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Prov, IBI Tk Prov) serta Perwakilan BKKBN Provinsi
- Jumlah Angkatan : 9 Angkatan
- Alokasi Waktu : 24 JP / 5 hari pelaksanaan
- Metode : Full daring / on line

Pelatihan Fasilitator dengan Metode Tatap Muka (Klasikal)  
Minggu IV Oktober – Minggu II Nov 2021

- Lokasi : 6 Provinsi (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT & Sulawesi Barat)
- Jumlah Peserta : 2593 Fasilitator Kab/kota
- Target Peserta : PKB/PLKB Non PNS per Kecamatan & Mitra Strategis Tk Kab/Kota (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Kab/Kota, IBI Tk Kab/Kota)
- Jumlah Angkatan : 182 Angkatan
- Alokasi Waktu : 1 hari Pembelajaran Mandiri + 8 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator
- Tatap muka (klasikal) di tingkat Kab/Kota

Pelatihan Fasilitator dengan Metode Daring (On Line)  
Minggu IV Oktober – Minggu II Nov 2021

- Lokasi : 27 Provinsi
- Jumlah Peserta : 6994 Fasilitator kab/kota
- Target Peserta : PKB/PLKB Non PNS per Kecamatan & Mitra Strategis Tk Kab/Kota (Dinkes, OPD KB, TP PKK Tk Kab/Kota, IBI Tk Kab/Kota)
- Jumlah Angkatan : 152 Angkatan
- Alokasi Waktu : 1 hari Pembelajaran Mandiri + 8 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator secara daring/on line
- Daring / full online

Orientasi bagi Kader  
Minggu II Nov – Minggu I Des 2021

- Lokasi : 33 Provinsi
- Jumlah Peserta : 600.000 TPK
- Jumlah Angkatan : 12.000 Angkatan
- Target Peserta: Tim Pendamping Keluarga
- Alokasi Waktu: 1 hari Pembelajaran Mandiri + 6 JP / 1 hari tatap muka dengan fasilitator
- Tatap muka (klasikal) di tingkat Kecamatan

# PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)

**Per 30 Oktober 2021:  
192.633 Tim (96,32%)  
dari target 200.000 Tim**



**Per 4 Nov 2021:  
196.424 Tim (98,21%)  
dari target 200.000 Tim**

No	Provinsi	Target	Capaian	%
1	Bangka Belitung	1.050	1.050	100,00
2	Papua	5.798	5.798	100,00
3	Kalimantan Selatan	3.072	3.072	100,00
4	Gorontalo	986	986	100,00
5	Sulawesi Barat	953	953	100,00
6	Riau	3.558	3.558	100,00
7	Sulawesi Selatan	6.682	6.682	100,00
8	Jambi	2.573	2.573	100,00
9	Papua Barat	1.837	1.837	100,00
10	Jawa Timur	31.243	31.243	100,00
11	Bengkulu	1.867	1.867	100,00
12	Aceh	7.470	7.470	100,00
13	Sulawesi Tengah	2.484	2.484	100,00
14	D.I.Yogyakarta	1.852	1.852	100,00
15	Sulawesi Utara	2.348	2.348	100,00
16	Kalimantan Tengah	2.184	2.184	100,00
17	Maluku Utara	1.246	1.246	100,00
18	Sumatera Utara	10.323	10.323	100,00
19	Sumatera Selatan	6.130	6.130	100,00
20	Kepulauan Riau	1.115	1.116	100,09
21	Lampung	6.098	6.098	100,00
22	Jawa Tengah	27.931	27.931	100,00
23	Sulawesi Tenggara	2.597	2.585	99,54
24	Kalimantan Barat	4.203	4.140	98,50
25	Sumatera Barat	3.353	3.219	96,00
26	NTB	4.097	3.931	95,95
27	Kalimantan Timur	1.988	1.903	95,72
28	NTT	4.298	4.041	94,02
29	Maluku	1.436	1.317	91,71
30	Jawa Barat	37.184	33.877	91,11
31	Bali	3.327	2.858	85,90
32	Kalimantan Utara	581	441	75,90
33	Banten	8.136	5.520	67,85
<b>Nasional</b>		<b>200.000</b>	<b>192.633</b>	<b>96,32</b>



# MONITORING DAN EVALUASI



**MONITORING** dan **EVALUASI** dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang berkesinambungan ttg pelaksanaan pendampingan keluarga serta untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian pelaksanaan pendampingan keluarga

## PERSIAPAN

- Menentukan metode monev
- Menentukan Sasaran
- Menentukan Tim Pelaksana
- Menyusun jadwal kunjungan lapangan
- Menyiapkan instrument monitoring an evaluasi

## PELAKSANAAN

- Pelaksanaan: observasi dan wawancara terhadap TPK
- Dilakukan secara terpadu dan berjenjang:
  - Pusat:** K/L terkait, organisasi profesi dan mitra
  - Provinsi:** TPPS Provinsi
  - Kab/Kota:** TPPS kab/kota



Monev dilakukan minimal dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan



### Indikator input:

- Ketersediaan tenaga pendamping keluarga (TPK)
- Ketersediaan sarana dan prasarana

### Indikator Proses:

- Terlaksananya rapat koordinasi TPK dengan TPPS
- Pelaksanaan program pendampingan oleh TPK

### Indikator Output:

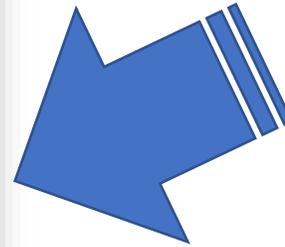
- Persentase TPK berkinerja baik.



**PANDUAN PELAKSANAAN  
PENDAMPINGAN KELUARGA**  
*dalam upaya*  
**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**



JAKARTA, 2021



## BAHAN ACUAN

<http://bit.ly/PanduanTPK>

Panduan ini di dukung oleh :





**76<sup>TH</sup>** | INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH



**bkkbn** 

**BERSAMA KITA BISA  
BERSINERGI BAGI BANGSA**

